

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan imigran ilegal dari Meksiko ke AS pada era Joe Biden dan Trump 2.0 mengalami tarik ulur kebijakan dan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh interaksi antara norma global dan pendekatan keamanan perbatasan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa baik pemerintahan Joe Biden maupun Donald Trump pada dasarnya sama-sama berupaya merespons kekhawatiran publik AS terhadap masuknya imigran ilegal, khususnya dari Meksiko. Namun, perbedaan terletak pada cara kedua pemerintahan menerjemahkan kekhawatiran tersebut ke dalam kebijakan.

Pada era Biden, terjadi proses dari rangkaian *norm diffusion*, di mana norma global tentang perlindungan migran dan HAM mulai mempengaruhi arah kebijakan domestik AS. Pengaruh norma tersebut terlihat dari pergeseran pendekatan pemerintah yang tidak lagi memosisikan imigran ilegal sebagai ancaman keamanan, melainkan sebagai isu yang dikelola melalui mekanisme administratif. Sejalan dengan proses *norm diffusion* tersebut, terjadi juga pola desekuritisasi, dimana isu imigran ilegal tidak lagi dikonstruksikan menjadi sebuah ancaman dan membutuhkan tindakan represif yang ditandai dengan penghentian kebijakan represif era sebelumnya, pembatasan penggunaan tindakan luar biasa, serta upaya penyesuaian kebijakan dengan norma global seperti prinsip *non-refoulement* dan perlindungan migran.

Namun, arah kebijakan tersebut tidak berlangsung secara berkelanjutan.

Pada era Trump 2.0, terjadi pergeseran kembali menuju resekuritisasi, dimana isu imigran ilegal dari Meksiko kembali dibingkai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, stabilitas sosial, dan ekonomi domestik. Pendekatan ini ditandai dengan kebijakan Trump yang cenderung represif dan menunjukkan ketidaksesuaian dengan norma global perlindungan migran yang diratifikasi AS seperti 1967 Protocols dan prinsip *non refoulement*. Kebijakannya juga bertentangan dengan norma global seperti Pasal 9 UDHR dan Pasal 22 ICRMW, yang meskipun tidak diratifikasi oleh AS, tetap menjadi acuan internasional dalam perlindungan migran.

Dengan demikian, interaksi antara norma global dan pendekatan keamanan perbatasan tidak menghasilkan satu arah kebijakan yang tetap, melainkan membentuk tarik ulur kebijakan yang berujung pada siklus desekuritisasi dan resekuritisasi. Dinamika tersebut menunjukkan adanya *regime complexity* dalam mengatasi isu imigran ilegal dari Meksiko, dimana di satu sisi terdapat *regime* yang menekankan prinsip kemanusiaan dan perlindungan imigran, sementara di sisi lain terdapat *regime* keamanan perbatasan. Tumpang tindih antara kedua rezim tersebut menyebabkan kebijakan penanganan imigran ilegal Meksiko di AS terus bergerak secara fluktuatif, bergantung pada orientasi politik pemerintahan yang berkuasa.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemangku kebijakan AS dapat merumuskan kebijakan penanganan imigran ilegal khususnya dari Meksiko, yang lebih konsisten dan berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan keamanan perbatasan dan komitmen terhadap norma global perlindungan imigran.

Alih-alih mengandalkan pendekatan yang berubah drastis mengikuti pergantian kepemimpinan politik, pemerintah AS perlu memperkuat mekanisme kebijakan yang berbasis prosedur hukum, perlindungan HAM, dan pemeriksaan individual. Pendekatan semacam ini tidak hanya lebih sejalan dengan kewajiban internasional yang telah diadopsi, tetapi juga berpotensi mengurangi ketegangan kebijakan serta meningkatkan legitimasi penanganan imigrasi di mata publik domestik dan komunitas internasional.

Penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam penelitian ini terutama dalam ruang lingkup analisis yang berfokus pada dinamika kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada era Joe Biden dan Trump 2.0 dari perspektif normatif dan keamanan. Penelitian ini belum secara mendalam mengkaji dampak langsung kebijakan tersebut terhadap kondisi sosial, ekonomi, maupun keamanan para imigran di lapangan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat menelaah lebih jauh dampak implementasi kebijakan penanganan imigran ilegal terhadap kehidupan imigran serta menggunakan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam perbandingan kebijakan penanganan imigran ilegal di AS dengan negara lain yang menghadapi isu serupa, atau menelaah dampak jangka panjang kebijakan migrasi terhadap stabilitas kawasan dan hubungan bilateral. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas analisis dengan menggunakan pendekatan empiris, seperti wawancara atau studi kasus lapangan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap para migran dan sistem perlindungan internasional.